



Keluarga Korban Desak Pemerintah Usut Tuntas Kasus Mei 1998

JAKARTA — Keluarga korban kerusuhan yang terjadi pada Mei 1998 terus mendesak pemerintah agar menuntaskan pengusutan kasus pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang terjadi 20 tahun silam. Staf Program Pemulihan Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia, Sri Hidayah, mengatakan keluarga korban masih menuntut pemerintah menuntaskan kasus tersebut. "Termasuk Presiden Joko Widodo untuk membuktikan janji," kata dia, kemarin.

Menurut Sri, yang juga seorang pendamping Ikatan Pendampingan Keluarga Korban HAM, pihaknya terus berupaya mendampingi para keluarga korban sampai pemerintah menuntaskan kasus itu. Mereka terus menagih janji pemerintah lantaran tak ingin kerusuhan yang terjadi pada Mei 1998 itu tenggelam dan dilupakan begitu saja.

Kemarin, sejumlah keluarga korban serta organisasi masyarakat sipil kembali menggelar aksi tabur bunga di depan Mal Klender, Jakarta Timur. Mereka juga melakukan aksi doa bersama di Pemakaman Umum Pondok Rangan.

Salah satu keluarga korban, Darwin, mengaku jenuh lantaran pemerintah tidak kunjung memenuhi janji untuk mengusut tuntas kasus pelanggaran HAM berat

tersebut. Orang tua dari Eten Karyana, salah satu korban kebakaran massal pada Mei 1998, itu mengatakan ia telah berkali-kali menemui presiden. Mulai dari Presiden Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono, hingga Joko Widodo. Mereka berjanji mencarikan jalan

"Tapi janji itu hanya sampai meja makan. Setelah itu, sampai sekarang tidak ada kelanjutan."

keluar dalam menuntaskan kasus Mei 1998. "Tapi janji itu hanya sampai meja makan. Setelah itu, sampai sekarang tidak ada kelanjutan," ujar laki-laki 60 tahun tersebut.

Tempo berupaya menghubungi juru bicara kepresidenan, Johan Budi. Namun, hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan dari pihak pemerintah. Meski begitu, sebelumnya Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto memastikan pemerintah masih berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan itu. "Rapat koordinasi terus dilakukan agar penyelesaiannya lewat jalur non-yudisial, karena kami ingin mencegah friksi," kata dia.